

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam
Pemberdayaan Perempuan Nama : Nadia Dunnya Jadita
NIM : 14401244002

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 4 Agustus 2020

Reviewer

Pembimbing



Dr. Sunarso, M.Si
NIP. 196005211987021004



Chandri Dewanti Pratiwi S.H., L.L.M
NIP. 198007022005012002

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)



1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain

UPAYA PEMERINTAH DESA BANGUNHARJO DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BANGUNHARJO VILLAGE GOVERNMENT'S EFFORT TO EMPOWER WOMEN

by: Nadia Dunnya Jadita dan Chandra Dewi Puspitasari

nadia.dunnya@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FIS UNY

Abstrak

Kajian ini diangkat berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan, serta mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan subjek penelitian yakni: Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Bangunharjo, Staff Seksi bidang pelayanan Pemerintahan Desa Bangunharjo, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pemerintahan Desa Bangunharjo serta Kepala Dukuh Bakung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, meliputi tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan terdiri dari dua bidang, yaitu 1) Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan bidang ekonomi, pengembangan produk ekonomi desa dan kerjasama dengan lembaga terkait pemberdayaan perempuan, 2) Pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial politik yang dilakukan melalui pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial politik dan melalui pelestarian kegiatan sosial kemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, sosial dan politik meliputi; 1) kurangnya sumber daya manusia; 2) kurangnya anggaran dana; 3) kurangnya sarana dan prasarana, dan 4) kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan.

Kata Kunci: *Upaya, Pemerintah Desa Bangunharjo, Pemberdayaan Perempuan*

Abstract

This study is based on research that has the purpose describing the efforts of the Bangunharjo Village Government in the empowerment of women. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Determination of the study subject using purposive technique with the subject of research, with research subjects: Head of Government Services Section of Bangunharjo Village, Staff Section of Government Services at Bangunharjo Village, Head of Administration and General Affairs of the Government of Bangunharjo Village and Head of Dukuh Bakung. Data collection techniques using interviews and documentation. Data validity inspection techniques in this study used cross check techniques. Subsequent data analysis techniques use inductive data analysis, including data reduction stages, data categorization, data presentation and conclusion retrieval. The results showed that the efforts of the Bangunharjo Village in the empowerment of women consist of two fields 1) Empowering women in economics conducted through socialization and training of economic field, development of village economic products and cooperation with institutions related to women Empowerment, 2) Women empowerment in socio-political field conducted through the involvement of women in various socio-political activities and through the preservation of societal activities. The barriers faced by the village government in the development of women in the economic, social and political areas include; 1) insufficient of human resources; 2) insufficient of budget funds; 3) insufficient of facilities and infrastructure, and 4) insufficient of public awareness in empowerment.

Keywords: *Efforts, Bangunharjo Village Government, Women's Empowerment*

PENDAHULUAN

Munculnya berbagai masalah disegala sektor kehidupan hingga ke tingkat desa melahirkan konsep paradigma

pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*) yang menekankan

pada pentingnya mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) (Aziz, dkk, 2017: 6). Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam sebuah pembangunan.

Sebagai negara hukum yang menghargai hak dan kebebasan, Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 telah mendorong lahirnya persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan. Terkait dengan hak persamaan kedudukan laki-laki maupun perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipastikan bahwa keduanya sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Sebagai subjek pembangunan keduanya mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan (Nugroho, 2008: 19). Namun pada realitas menunjukkan perempuan mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki baik di bidang pekerjaan, kesehatan, politik, ketenagakerjaan ataupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nurhalimah, 2018: 47).

Menyikapi hal tersebut di atas, Pemerintah telah memberikan ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk memenuhi haknya melalui kontribusi baik di pemerintahan maupun kemasyarakatan. Salah satu wujud konkrit upaya pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU Desa, negara telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Ita dkk, 2015: 890).

Penegasan mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat desa termasuk perempuan desa di dalamnya semakin nampak jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Permen DPDTT No. 16 Tahun 2018). Melalui Peraturan Menteri tersebut telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas bahwa prioritas pemberdayaan masyarakat desa salah satunya ditujukan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam catatan kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik disebutkan menduduki posisi ke - 3 dalam indeks Pembangunan Gender di Indonesia (BPS, 2018: 29). Namun temuan tersebut diikuti fakta bawah DIY merupakan salah satu dari tiga provinsi yang mengalami penurunan dalam hal pemberdayaan gender, artinya indeks pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan tinggi secara nasional sedangkan angka pemberdayaan perempuan justru berada di bawah standar nasional.

Desa Bangunharjo sebagai salah satu desa dengan wilayah administrasi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Sleman juga memiliki peluang yang sama untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Namun, sebagai daerah dengan luas wilayah yang lebih dibanding desa lainnya serta penyelenggara pemerintahan yang juga secara kuantitas lebih banyak dari desa lain, Bangunharjo dianggap kurang mampu memaksimalkan potensi perempuan desa di berbagai bidang (Letsmana, 2017: 6). Salah satu contoh yaitu dalam proses pemilihan dukuh, Desa Bangunharjo yang memiliki 17 Padukuhan “hanya” memberikan 2 kursi untuk perempuan yaitu di Padukuhan Bakung dan Padukuhan Pandeyan. Hal ini menunjukkan minimnya pemberdayaan perempuan dalam bidang pemerintahan. Bahkan mirisnya dalam proses pemilihan

padukuhan terdapat kasus penolakan dukuh perempuan di Padukuhan Pandeyan. Hal ini menunjukkan betapa diskriminasi masyarakat terhadap perempuan masih menjadi momok dalam mewujudkan keberdayaan perempuan (Tirto.id, 2019). Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh Letsmana (2017: 7) disebutkan bahwa beberapa padukuhan di Desa Bangunharjo memiliki potensi yang dapat dikembangkan, misalnya saja industri rumah tangga/usaha kecil menengah penghasil tahu tempe yang ada di Padukuhan Ngoto.

Pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan merupakan salah satu kunci untuk memajukan berbagai sektor kehidupan serta menjamin berlangsungnya kehidupan tanpa diskriminasi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemerintahan desa. Melihat adanya penolakan terhadap perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Dukuh Pandeyan Desa Bangunharjo serta kurang maksimalnya peran perempuan dalam berbagai sektor tentu menjadi gambaran bahwa pemberdayaan proses pemberdayaan perempuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini tentu bertolak belakang dengan predikat Kabupaten Bantul sebagai *pilot project* bagi pengembangan desa ramah perempuan. Walaupun Desa Bangunharjo belum mendeklarasikan diri sebagai desa ramah perempuan, namun potensi jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki seharusnya dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hal-hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam pemberdayaan perempuan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait pengembangan demokrasi masyarakat. Selain itu manfaat praktis diharapkan dapat

menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan pemerintah desa pada khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai September 2019 sampai Desember 2019 di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, tepatnya di lingkungan Pemerintah Desa Bangunharjo. Selanjutnya subjek dalam penelitian ini adalah, Kepala Seksi Pelayanan di Pemerintahan Desa Bangunharjo; Staff Seksi bidang pelayanan di Pemerintahan Desa Bangunharjo; Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Bangunharjo, dan; Dukuh Bakung sebagai salah seorang dukuh perempuan di Desa Bangunharjo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan teknik *cross check*. Sedangkan terkait dengan analisa data menggunakan metode deskriptif induktif, yakni permasalahan-permasalahan khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Proses analisis data sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 247- 253), yakni melalui tahap tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Desa Bangunharjo selaku pelaksana pemerintahan di tingkat desa, menjadi ujung tombak bagi negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah di tingkat desa adalah dengan

melakukan pemberdayaan masyarakat salah satunya pemberdayaan perempuan. Menurut analisa peneliti, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah Desa Bangunharjo dalam melakukan pemberdayaan perempuan yaitu pada bidang ekonomi serta bidang sosial politik.

Menurut peneliti terdapat tiga garis besar upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam memberdayakan perempuan desa dalam bidang ekonomi yaitu *pertama*, melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam bidang ekonomi, *kedua*, mengembangkan produk ekonomi desa, dan *ketiga*, melakukan kerjasama dengan lembaga terkait pemberdayaan perempuan. Sedangkan dalam bidang sosial politik yaitu melalui; *pertama*, melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial politik, *kedua*, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

a. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam bidang ekonomi

Melalui tahapan sosialisasi dan pelatihan masyarakat diharapkan dapat mengerti dan menerapkan esensi dari kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Upaya pertama ini penting untuk dilakukan mengingat menurut Adi (2008: 77) bahwa tahapan pertama dalam proses pemberdayaan yaitu dimulai dengan masyarakat yang apatis yang menyadari adanya masalah tetapi merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Adapun bidang ekonomi yang digarap oleh Pemerintah Desa Bangunharjo yaitu;

Pertama, melalui pelatihan pemanfaatan kain flanel. Program pelatihan dalam bentuk pemanfaatan kain flanel ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo melalui sebuah kerjasama dengan Rumah Belajar Modern (RBM) DIY. Kegiatan ini telah dimulai sejak awal tahun 2017. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan kain flanel ini disambut cukup antusias oleh sebagian ibu-ibu di Desa Bangunharjo. Namun, dengan berbagai alasan seperti kesibukan di berbagai tempat kerja, memiliki anak kecil sehingga cenderung tidak ingin repot, hingga kurang tertarik dengan kegiatan pelatihan, pada

akhirnya menjadikan sebagian dari ibu-ibu tersebut tidak mengikuti kegiatan ini. kegiatan ini dapat dikatakan sangat bermanfaat. Hingga saat ini, terbukti bagi sebagian ibu-ibu yang menekuni bidang pemanfaatan kain flanel telah membuka usaha sendiri dan dapat memperoleh penghasilan dari kegiatannya tersebut.

Kedua, melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan ini ditujukan kepada ibu-ibu di Desa Bangunharjo khususnya kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Bangunharjo. Karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki halaman pekarangan yang luas, maka Pemerintah Desa Bangunharjo melalui pelaksana kewilayahan yaitu dukuh menyewa lahan kosong agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut.

Pemanfaatan lahan pekarangan melalui pelatihan media tanam hidrogel ini menjadikan ibu-ibu di lingkungan Desa Bangunharjo hampir di setiap RTnya memiliki lahan khusus untuk pengembangan hidrogel yang ditanami berbagai sayuran yang dapat dipanen bersama. Bahkan tidak jarang di rumah-rumah warga juga terdapat media tanam hidrogel, walaupun berukuran kecil namun sayur-sayuran yang ditanam bisa dimanfaatkan dan diolah sendiri.

Ketiga, melalui pengelolaan bahan pangan. Kegiatan ini ditujukan kepada ibu-ibu di Desa Bangunharjo, khususnya kepada ibu-ibu yang tergabung dalam PKK. Contoh pengolahan yang diberikan yaitu dengan membuat keripik dari buah-buahan dan sayuran. Produk-produk pengolahan pangan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini yang kemudian dititipkan di kantin sekitar kantor desa atau ketika sedang ada kegiatan yang melibatkan pemerintah desa, produk tersebut dapat dipamerkan sekaligus dijual. Selain untuk menambah kas keuangan PKK, masing-masing dari anggota PKK juga dapat membuat sendiri kemudian dititipkan di warung-arung sekitar rumah sehingga sedikit banyak menambah penghasilan keluarga.

Keempat, melalui pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan. Pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan ini ditujukan kepada kelompok ibu-ibu rumah tangga supaya memiliki kegiatan lain di dalam rumah. Adapun hal-hal yang dilatih misalnya pembuatan gantungan

kunci dari benang, pemanfaatan manik-manik untuk membuat gantungan kunci, ataupun tas kulit.

Kelima, melalui pelatihan pemanfaatan internet. Pelatihan ini ditujukan kepada kelompok perempuan terutama kepada perempuan yang berkisar umur 18 – 35an tahun. Pelatihan yang diberikan berupa cara-cara bagaimana memulai bisnis dengan memanfaatkan jaringan internet. Selain itu juga diberikan gambaran mengenai potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memulai penggunaan media *online* dengan bijak.

2. Melakukan pengembangan produk ekonomi desa

Sebagaimana dikatakan oleh Melly G. Tan (dalam Aziz, 2017: 39) bahwa peranan perempuan dalam pembangunan dapat dimaknai dengan dua hal penting yaitu, *pertama*, pembangunan memberi kemudahan bagi perempuan untuk ikut berupaya meningkatkan diri dan keluarganya; dan *kedua*, pembangunan memberi kemudahan bagi perempuan untuk menyalurkan tenaga, ketrampilan, pikiran dan keahliannya dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu pengembangan produk yang sebelumnya telah digagas oleh kelompok-kelompok perempuan desa khususnya di Desa Bangunharjo, apabila dikembangkan maka diyakini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan desa. Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo adalah dalam bentuk produk barang. Potensi produk desa yang cukup besar sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Sebagai wujud pemberdayaan perempuan, maka Pemerintah Desa Bangunharjo memfasilitasi dalam bentuk bantuan promosi, ijin produksi hingga bantuan alat-alat produksi kepada kelompok kreatif yang ada di Desa Bangunharjo. Selain itu rata-rata produk kreatif yang berkembang di Desa Bangunharjo dipelopori oleh ibu-ibu.

3. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait

pemberdayaan perempuan

Melakukan kerjasama dalam hal pemberdayaan perempuan memiliki dua keuntungan, sebagaimana disampaikan oleh Adi (2008: 77) keuntungan tersebut dapat berupa, *pertama*, untuk meminimalkan persaingan di antara perempuan dan memperkuat modal usaha dalam kelompok; *kedua*, untuk meningkatkan pendapatan dengan memperluas jangkauan pemasaran, memasuki segmen pasar yang lebih luas. Hal ini tentu semakin menguatkan bahwa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak merupakan salah satu bagian penting dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Desa Bangunharjo. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam melakukan pemberdayaan perempuan antara lain:

Pertama, dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul. Pemerintah Desa Bangunharjo melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul adalah dalam rangka melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok perempuan di Desa Bangunharjo dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang keterampilan dan kerajinan tangan membuat tas dari benang rajut, pelatihan memasak, menjahit dan melakukan pengemasan makanan.

Kedua, kerjasama dengan Rumah Belajar Modern (RBM) DIY. Kegiatan yang melibatkan Rumah Belajar Modern (RBM) DIY sudah cukup lama dilakukan, yaitu terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Sasaran utama dari RBM adalah meningkatkan minat belajar bagi kelompok perempuan di Desa Bangunharjo. Kerjasama antara Pemerintah Desa Bangunharjo dan RBM DIY ini dilaksanakan dalam bentuk tiga program kreativitas, yaitu; *pertama*, Pelatihan pemanfaatan kain flanel; *kedua*, Pelatihan kreativitas membuat; *ketiga*, pelatihan kreativitas pembuatan tanaman hidrogel.

b) Pemberdayaan perempuan dalam

bidang sosial politik

1. Melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial politik

Pemberdayaan masyarakat khususnya kepada kelompok perempuan dalam bidang sosial budaya ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri DPDTT No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa khususnya pada pasal 10 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa “dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas”. Maka hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dan budaya. Adapun beberapa kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo di antaranya yaitu; *Pertama*, melalui sosialisasi dan pelatihan kesehatan. Program yang diusung dalam kegiatan ini di antaranya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya perempuan tentang Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK).

Adapun 4 masalah kesehatan yang dimaksud yaitu kematian bayi, angka kematian ibu, ibu hamil risti dan gizi buruk. Selain sosialisasi yang dilakukan, pemberdayaan perempuan dilakukan sebagai kader-kader posyandu.

Berkaitan dengan menjaga kesehatan, desa juga mencanangkan 30 menit olahraga setiap hari. Walaupun bersifat umum, namun kegiatan ini kemudian dimasukkan dalam senam rutin setiap seminggu sekali sehingga lebih terjadwal bagi ibu-ibu di setiap padukuhan.

Kedua, melalui pelatihan membuat. Pelatihan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo melalui kerjasama dengan Rumah Baca Modern (RBM) DIY. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan keterampilan kepada

ibu-ibu untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan, salah satunya melalui kegiatan membuat. Nilai-nilai budaya yang kian luntur menuntut generasi saat ini untuk peka terhadap masalah tersebut. Maka melalui kegiatan pelatihan membuat, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Adapun cara membuat yang diajarkan adalah membuat secara tradisional atau dengan menggunakan canting.

Ketiga, melalui gerakan pelestarian budaya Jawa. Kegiatan ini awalnya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada kelompok-kelompok perempuan atau masyarakat umum. Setelah proses sosialisasi, dilakukan pembiasaan terhadap pengetahuan yang diperoleh, misalnya dengan membiasakan berpakaian Jawa dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo. Selain itu, juga diadakan lomba pidato Bahasa Jawa, kelompok vokal Bahasa Jawa oleh ibu-ibu, belajar *nyiden* atau *nembang* yang juga diutamakan untuk ibu-ibu.

Keempat, melalui penyertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyetaraan gender yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan ataupun laki-laki untuk duduk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyetaraan lain misalnya melalui proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD memberikan syarat keterwakilan perempuan di dalamnya. Maka pemerintah desa ikut membantu mendorong keterlibatan perempuan dalam BPD tersebut.

2. Melakukan pelestarian kegiatan sosial kemasyarakatan

Adapun bentuk-bentuk pelestarian kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam upaya

memberdayakan perempuan desa di antaranya yaitu; Pertama, melalui pembinaan majelis tak'lim, hadroh, dan pendampingan kegiatan keagamaan. Pemerintah Desa Bangunharjo melakukan pembinaan supaya berbagai kegiatan tetap berjalan dan lebih berkembang. Sebagai contoh dalam pengembangan hadroh dan majelis tak'lim, Pemerintah Desa Bangunharjo telah berupaya melakukan pemberdayaan dengan cara memfasilitasi kegiatan tersebut mulai dari penyediaan tempat, alat-alat, mencari palatih dan juga mendaftarkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam berbagai perlombaan. Upaya pemberdayaan melalui kegiatan fasilitator bukanlah suatu hal yang salah. Hal ini dapat dilihat dalam pandangan Prijono dan Pranata (1996: 87) yang menyatakan bahwa dua dari tiga inti pemberdayaan yaitu pengembangan dan memperkuat potensi.

Kedua, melalui pengembangan kampung sehat. Kegiatan pengembangan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo yaitu pengembangan kegiatan kampung sehat. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara program desa dengan program masing-masing padukuhan. Program kampung sehat merupakan program yang telah ada sejak lama, salah satunya berlangsung di Padukuhan Pandeyan. Program kampung sehat ini dinilai oleh Pemerintah Desa Bangunharjo berhasil menekan angka penyakit, angka kematian dan kesadaran akan kesehatan di Padukuhan Pandeyan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pemikiran pentingnya dilakukan pengembangan terhadap kampung sehat ini. Adapun model pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo yaitu dengan bantuan fasilitas kepada kegiatan kampung sehat tersebut.

Hambatan Pemerintah Desa Bangunharjo dalam Melakukan

Pemberdayaan Perempuan Desa

dilihat dari dua aspek penting, yakni secara kualitas dan kuantitas. Apabila ditinjau dari segi kualitas dapat terlihat dari kurangnya pemahaman konsep pemberdayaan perempuan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan di Desa Bangunharjo. Selanjutnya dari sektor kuantitas. Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bangunharjo ini dapat dilihat dari jumlah penyelenggara pemerintahan yang minim, khususnya minimnya perempuan dalam pemerintahan. Saat ini jumlah perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangunharjo hanya sekitar tujuh orang, dengan rincian dua orang di padukuhan, dua orang di sektor administrasi pemerintahan dan Menurut Adi (2008: 77) beberapa hal yang biasanya menjadi hambatan dalam melakukan pemberdayaan perempuan meliputi akses yang dimiliki oleh perempuan. Akses yang dimaksud tentu berkaitan dengan meninggalkan kegiatan yang dilakukan, izin yang diberikan oleh keluarga, transportasi dan informasi teknologi. Selain hal tersebut, kurangnya dana atau modal dapat menjadi hambatan yang berpengaruh besar pada proses pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Selanjutnya dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Bangunharjo dalam upaya pemberdayaan perempuan terbagi menjadi empat hal. Adapun penjelasan mengenai empat hambatan tersebut yaitu;

Pertama, Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Adapun terbatasnya SDM ini dapat tiga orang di sektor pelaksana teknis.

Kedua, yaitu kurangnya anggaran dana. Pengaruh yang terlihat dengan jelas karena minimnya anggaran adalah intensitas pemberdayaan perempuan di berbagai bidang belum maksimal dan kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah desa. Anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo menurut APBDes tahun 2019 untuk bidang pemberdayaan

masyarakat mencapai sekitar Rp. 397.000.000,00. Jumlah ini merupakan jumlah yang minim, mengingat APBDes Desa Bangunharjo mencapai lebih dari empat milyar rupiah.

Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini yaitu yang berkaitan dengan pembangunan non fisik. Salah satu contoh yang dapat diambil yakni ketersediaan gedung untuk melakukan kegiatan. Gedung yang tersedia untuk melakukan kegiatan hanya ada satu saja, sedangkan padukuhan yang terdapat di Desa Bangunharjo mencapai tujuh belas padukuhan. Akibatnya ketika hendak melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan budaya lainnya terkadang harus saling mengalah apabila hendak melakukan kegiatan, belum lagi apabila ada kegiatan desa yang lain. Hal lain yang bisa dijelaskan misalnya dalam melakukan pemberdayaan perempuan salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan. Namun masalah yang timbul yaitu minimnya pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat sangat kecil sehingga dirasa kurang cocok untuk diterapkan hasil pelatihan.

Keempat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo. Dalam suatu kegiatan biasanya kelompok perempuan yang menjadi pelaku dalam kegiatan pemberdayaan dengan alasan memiliki banyak kegiatan akhirnya tidak mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Selain hal tersebut kurangnya kesadaran masyarakat juga dapat dilihat dari sektor kesadaran dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pemerintah Desa Bangunharjo telah berupaya untuk memberikan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan, misalnya posyandu. Adanya beberapa peralatan yang belum lengkap,

tidak melahirkan inisiatif masyarakat untuk melengkapi, justru yang terjadi adalah berhentinya kegiatan posyandu. Fakta yang paling mencolok berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam bidang pemerintahan ditunjukkan dengan adanya penolakan sebagian masyarakat pada proses pemilihan kepala dukuh. Penolakan tersebut dinilai sangat menciderai semangat emansipasi wanita dalam berbagai sektor kehidupan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam melakukan pemberdayaan perempuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Desa Bangunharjo dalam Melakukan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo fokus pada dua hal besar yakni ekonomi dan sosial politik.

a. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam memberdayakan perempuan pada sektor ekonomi dilakukan melalui tiga hal yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang digarap oleh Pemerintah Desa Bangunharjo yaitu, 1) pemanfaatan kain flanel; 2) pemanfaatan lahan pekarangan; 3) Pengelolaan bahan pangan; 4) pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan; 5) pelatihan pemanfaatan internet. *Kedua*, melakukan pengembangan produk ekonomi desa. Adapun bentuk-bentuk pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo dalam upaya memberdayakan perempuan desa melalui pemfasilitasan dalam bentuk bantuan promosi, ijin produksi, bantuan pelatihan pengemasan, fasilitas pameran

produk hingga bantuan alat-alat produksi kepada kelompok kreatif yang ada di Desa Bangunharjo, dan; *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan lembaga terkait pemberdayaan perempuan Dalam hal pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, Pemerintah Desa Bangunharjo melakukan kerjasama dengan instansi yang memiliki prospek pengembangan ekonomi masyarakat seperti dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul. Kerjasama ini dilakukan terkait dengan berbagai kegiatan pelatihan UKM yang dilakukan di Desa Bangunharjo.

b. Pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial politik

Walaupun tidak sesering seperti pemberdayaan pada sektor ekonomi, namun Pemerintah Desa Bangunharjo telah melakukan upaya pemberdayaan perempuan pada sektor sosial politik diantaranya yaitu; Melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial politik seperti keanggotaan BPD dan kegiatan musyawarah desa. Selain itu dilakukan pula dalam bentuk pelestarian kegiatan sosial kemasyarakatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo di antaranya yaitu, *Pertama*, Pembinaan Majelis Tak'lim, Hadroh, dan pedampingan kegiatan keagamaan; *kedua*, Pengembangan kampung sehat.

2. Hambatan Pemerintah Desa Bangunharjo dalam Melakukan Pemberdayaan Perempuan

Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi dan sosial politik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharjo terdiri dari 4 aspek penting, yakni kurangnya SDM yang dapat dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya keterbatasan dari sisi anggaran dan dan juga sarana prasarana juga memberikan hambatan yang cukup besar dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Desa Bangunharjo. Penganggaran yang hanya sekitar 10-15% dari APBDes memberikan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan, penyediaan

sarana dan prasarana bagi kegiatan pemberdayaan. Selain hal tersebut rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemberdayaan masyarakat juga menjadikan hambatan berbagai kegiatan. Minimnya kehadiran dalam berbagai kegiatan dan penolakan pemimpin perempuan menjadi salah satu bukti tentang rendahnya kesadaran masyarakat.

Saran

Rekomendasi implikasi yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan temuan penelitian adalah sebagai berikut; *Pertama*, melakukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas ataupun secara kuantitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa Bangunharjo, khususnya berkaitan dengan bidang teknis dan kewilayahan. Peningkatan secara kualitas dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi perangkat desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan. Sedangkan peningkatan secara kuantitas dapat dengan melakukan *open recruitmen* staff baru dalam perangkat teknis pemerintahan desa, atau dengan melibatkan komponen karang taruna, Kelompok Wanita Tani (KWT) dan PKK dalam setiap kegiatan pemberdayaan perempuan.

Kedua, perlunya terobosan program atau kebijakan baru dari Pemerintah Desa Bangunharjo yang secara spesifik mampu memberdayakan perempuan desa di berbagai sektor, seperti program bantuan modal bagi UKM binaan desa, Program 1 desa satu produk yaitu dengan menetapkan satu produk andalan desa, kemudian dalam hal sosial dan pemerintahan Pemerintah Desa Bangunharjo dapat membuat kebijakan terkait dengan kepengurusan padukuhan yaitu dengan memberikan syarat minimal kepengurusan oleh perempuan pada setiap padukuhan. Kemudian dalam hal politik pemerintahan, dapat memberikan sosialisasi tentang hak warga negara dalam bidang politik seperti sekolah legislasi bagi perempuan.

Ketiga, perlunya melakukan kajian

mengenai anggaran dana pemberdayaan masyarakat. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan meninjau pemisahan antara anggaran pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Supaya dana dan program yang dikelola menjadi lebih berkualitas maka dapat dilakukan kerjasama antara program pembinaan dan pemberdayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, A, dkk. (2017). *Modul Jilid I: Kepemimpinan Perempuan di Desa*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- BPS. (2018). *Kecamatan Sewon dalam Angka: Sewon District in Figure 2018*. Yogyakarta: BPS Kab. Bantul.
- Ita, U, dkk. (2015). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*, 1 (5), 890-992.
- Letsmana, Antonius. (2017). Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Skripsi*, tidak dipublikasikan. APMD Yogyakarta.
- Nugroho, R D. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhalimah, Andi. (2018). Partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6 (2), 43-55.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syambudi, Irwan. (2019). Duduk Perkara Penolakan Perempuan Jadi Kepala Dukuh di Bantul diakses dari <https://tirto.id/duduk-perkara-penolakan-perempuan-jadi-kepala-dukuh-di-bantul-dSV2> pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 11:35 WIB
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa